Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

EKONOMI NURANI VS EKONOMI NALURI

Kata Pengantar:
A. Tony Prasetiantono, Ph.D

Hendrawan Supratikno

EKONOMI NURANI
vs
EKONOMI NALURI

Editor: Masirom dan Jay AM

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2011

Komentar Tokoh

Saya mengenal Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (Hendrawan) sudah sangat lama. Untuk jangka waktu yang sangat panjang Hendrawan dikenal sebagai ilmuwan murni yang membaktikan seluruh pengetahuannya guna mencerdaskan sesama anak bangsa. Pengetahuannya bertambah terus karena kecanduan/*passion* membacanya yang tiada putus dan pencarian keakuratan sumber-sumber bacaannya.

Hendrawan meniti karier sebagai tenaga pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, sampai gelar dan pangkat kesarjanaan yang sudah mentok, karena sudah tidak bisa meraih gelar maupun kedudukan formal yang lebih tinggi lagi.

Dalam posisi seperti ini saya mengenal Hendrawan lebih dekat lagi, karena kami bekerja sama dalam Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII).

Sebagaimana biasanya, sebagai ilmuwan Hendrawan selalu resah, terus-menerus mempertanyakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Maka tepat kalau kumpulan karangannya yang dibukukan diberi judul *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*. Judulnya ini sendiri sangat menarik, karena apa yang secara nalar benar tidak berarti memenuhi nurani kita.

Contoh yang paling jelas ialah pengertian tentang produk domestik bruto (PDB) yang diagungkan begitu saja. Apakah benar bahwa kalau volume produksi barang dan jasa di suatu negara meningkat, kemakmuran bangsa yang bersangkutan meningkat? Jelas, terutama kalau PDB dihitung per kapita. Ini ekonomi naluri. Tetapi kalau kita bertanya lebih dalam, apakah peningkatan PDB itu dinikmati oleh semua rakyat secara adil? (tidak merata!), maka jawabnya "belum tentu". Ekonomi nurani mempertanyakan yang lebih dalam hal ini.

Andaikan sebuah perusahaan raksasa Amerika berinvestasi sebesar USD200 miliar dalam bidang tambang batu bara di Indonesia. Ini bukan jumlah yang main-main. Karena itu, batu bara yang dikeduk keluar dari perut bumi Indonesia sangat banyak dan sangat besar nilainya. Menurut statistik kita PDB meningkat, tetapi yang memiliki batu baranya perusahaan AS. Pemerintah yang mewakili bangsa Indonesia sebagai pemilik batu bara yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia menerima royalti dan pajak yang sangat kecil. Ketika diekspor, statistik kita mencatat ekspor bangsa Indonesia meningkat, padahal bangsa Indonesia hanya memperoleh pajak ekspor yang tidak seberapa.

Ekonomi naluri mencatat PDB dan ekspor meningkat dan langsung saja menarik kesimpulan ekonomi kita maju pesat. Tetapi ekonomi nurani mempertanyakan, buat siapa PDB dan ekspor yang meningkat itu?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tecermin dalam tulisan-tulisan Hendrawan yang dihimpun dalam buku ini.

Hendrawan tidak puas hanya menelusuri nurani dalam ekonomi. Dia terjun dalam penyelenggaraan negara yang konkret dan praktis dengan terpilihnya menjadi anggota DPR.

Maka buku ini, dan tulisan-tulisan berikutnya, patut kita baca dan cermati karena akan menguak mana yang logis dan mana yang bermanfaat. Akan terungkap mana yang lebih logis tentang berapa kali seekor katak (kodok) melompat-lompat menyeberangi kali menurut seorang guru besar dan menurut anak jalanan.

Kwik Kian Gie

Ekonom, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Persatuan Nasional (15 Juli 1999–23 Agustus 2000), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Kabinet Gotong-royong (9 Agustus 2001–20 Oktober 2004)

Judul buku Prof. Hendrawan Supraktikno sangat tidak lazim karena nurani dan naluri sangat jarang dikaitkan dengan ilmu ekonomi, yang dinilai semakin pragmatis dan semakin kuantitatif. Kosakata "nurani dan naluri" lebih sering digunakan dalam agama, etika, dan psikologi. Memang sejak dua dekade terakhir banyak persentuhan dan *cross-breeding* antara ilmu ekonomi dan psikologi atau ilmu sosial lainnya. Hasil *cross-breeding* tersebut sangat menarik dan semakin menegaskan bahwa manusia bukan sekadar *economic animal* (binatang ekonomi) yang hanya melakukan maksimisasi keuntungan secara mekanistis. Ternyata banyak faktor-faktor lain yang menjadi dasar sikap dan keputusan manusia.

Buku Prof. Hendrawan Supraktikno ini adalah kumpulan artikel yang pernah ditulisnya, sehingga memang agak sulit mencari benang merah konsepsional dan teoritis tentang ekonomi nurani dan naluri. Benang merahnya ada dalam sikap Prof. Hendrawan yang konsisten membela kepentingan nasional. Buku ini lebih merupakan bunga rampai tentang berbagai topik dalam bidang ekonomi, dari paradigma, globalisasi, APBN, deindustrialisasi, kasus Century, korupsi, sampai reformasi birokrasi. Menarik untuk dibaca karena daya penulisan Prof. Hendrawan memikat dan mampu mengaitkan berbagai gejala ekonomi dengan kasus-kasus yang riil dan relevan dengan perkembangan pemikiran dalam masyarakat Indonesia.

Rizal Ramli, Ph.D

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Persatuan Nasional (23 Agustus 2000–12 Juni 2001)

Saya sering menyebut Hendrawan sebagai profesor pengamat hadiah-hadiah Nobel. Dia hafal luar kepala siapa saja penerima Nobel Ekonomi dan apa konsep mereka masing-masing. Dia memang bukan ekonom dalam arti *economist* yang mendalami ilmu ekonomi murni. Dia berada di garis tengah, dekat dengan ilmu manajemen, jadi wajar tulisannya *nyerempet* ke sana-kemari.

Belakangan Prof. Hendrawan Supratikno hijrah ke dunia politik. Ia kelihatan gemas melihat praktik-praktik ekonomi yang campur aduk dengan penyimpangan dan korupsi. Dia kritis sekaligus punya dasar moral yang teguh dan cinta tanah air yang dalam. Saya berharap ia tidak frustrasi memakai kacamata politik menatap ekonomi Indonesia dan tetap bisa jernih memandang perekonomian di tengah-tengah pergulatan meraih tempat yang tak berujung di antara ekonom-ekonom yang tanggung—sehingga terkesan kurang setara menandingi para *mainstreamer* yang cerdas dan mumpuni.

Ini adalah buku yang menarik untuk dibaca, melengkapi kematangan kita melihat perspektif lain agar tetap *openmind* dalam menjelajahi masa depan yang penuh tantangan.

Prof. Rhenald Kasali, Ph.D
Universitas Indonesia

Hal yang membedakan manusia dari hewan itu manusia mempunyai nurani. Namun, dua makhluk ini mempunyai kesamaan, yaitu tindakannya bisa digerakkan oleh naluri.

Dalam kehidupan ekonomi naluri memang diperlukan, tapi itu semua harus dikendalikan oleh nurani. Tanpa itu manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya seperti yang diingatkan oleh Thomas Hobbes.

Dengan nurani sebagai "panglima" maka "kesejahteraan ekonomi" akan diikuti, bahkan dilandasi oleh "kesejahteraan spiritual". Untuk itu kita perlu lebih sering mengasah "*intuitive thinking*" kita, jangan hanya "*rational thinking*".

Buku ini mengingatkan kita tentang bencana kehidupan manusia bila naluri menjadi panglima dalam hidup.

Sudhamek AWS,
CEO GarudaFood,
Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia

Prof. Hendrawan kami kenal sebagai ”kamus berjalan” (*walking dictionary*). Setiap kali kami berbicara tentang suatu kejadian atau kasus riil, Prof. Hendrawan selalu dapat menyebut teori dan ilmuwan yang menyampaikan teori tersebut.

Dr. Handry Satriago
Presiden Direktur General Electric Indonesia

Ketika kami kuliah di Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia, kami selalu antusias mengikuti kelas-kelas Prof. Hendrawan. Sama dengan kuliah-kuliahnya, tulisan-tulisan yang dihasilkannya juga terasa hidup dan memiliki daya pikat tersendiri.

Dr. Lily Sudhartio
Konsultan manajemen, alumnus Program Doktor FE-UI, Jakarta

Salah satu kekuatan tulisan Prof. Hendrawan adalah menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa dan ilustrasi yang mudah dipahami. Meski demikian, seperti yang sering dikatakannya, hanya orang cerdas yang mampu memahami dengan baik isi tulisannya. Saya melihat artikel yang ditulis ini meliputi bidang kajian yang beragam yang menunjukkan jangkauan jelajah keilmuan si penulis.

Dr. I Putu Gede Ary Suta
Chairman Ary Suta Center for Leadership, Strategy, and Critical Thinking, Jakarta

Saya sering merasa heran dan bertanya dalam hati, berapa banyak buku yang dibaca oleh Prof. Hendrawan, mengingat pokok bahasan yang ditulis begitu beraneka dan hampir selalu dikaitkan dengan ide tokoh-tokoh besar dalam dunia ilmu. Kemampuan mengulas baik hal yang mikro maupun makro merupakan keunggulan Prof. Hendrawan.

Dr. Dwi Soetjipto
Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk.

DAFTAR ISI

Pengantar Ahli

Kegemasan Seorang Ekonom-Politisi dari Salatiga

A. Tony Prasetiantono[1]

Jauh sebelum dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan, saya sudah bersahabat dengan Mas Hend—begitu saya menyebut Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, MBA—sebagai ekonom yang sangat energik, penuh antusiasme, gigih dalam berargumentasi, serta memiliki nasionalisme tinggi. Saya kerap bertemu dengannya di berbagai forum seminar, berbeda pendapat, namun tetap saling respek. Persahabatan semacam inilah yang tampaknya mengantarkan saya untuk diberi kesempatan menulis kata pengantar bukunya yang *colorful* ini.

Buku kumpulan esai pendeknya di berbagai media massa ini, meski tidak utuh benar, menurut saya sudah cukup berhasil merepresentasikan sosok Profesor Hendrawan. Dia adalah ekonom yang tekun dan benar-benar kaya minat serta kaya referensi. Tulisan-tulisan pendeknya telah mendemonstrasikan hal itu semua, sehingga saya pun semakin paham dan yakin akan sosoknya sebagai seorang *scholar* sejati.

Sebagai seorang ekonom yang lama berkarya di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, yang lokasinya relatif agak

1 A. Tony Prasetiantono, Ph.D adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM; Komisaris Independen Bank Permata; serta Redaktur *Prisma* (LP3ES Jakarta). Pernah menjadi Chief Economist BNI (2006-2010) dan Komisaris Independen Bank Mandiri (2003-2005).

"jauh dari mana-mana", Mas Hend berhasil membuktikan bahwa dirinya selalu *up to date*, tidak kalah dengan para "ekonom kota" (baca: Jakarta). Tulisannya kaya referensi, baik yang klasik maupun yang paling mutakhir. Karakteristik ini mengingatkan saya pada sepak terjang sederet dosen UKSW lain yang juga menonjol di pentas nasional, seperti Prof. Dr. Arief Budiman, Prof. Dr. Liek Wilardjo, Dr. Ariel Heryanto, maupun Dr. George Junus Aditjondro. Hal yang membedakan dari para tokoh tersebut, Mas Hend akhirnya memutuskan terjun ke politik praktis, yang telah mengantarnya ke Senayan sebagai anggota DPR Komisi VI (Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha), periode 2009-2014.

Sampai detik ini saya tidak tahu, mengapa akhirnya dia tertarik dan memutuskan untuk terjun ke arena politik praktis. Kalau boleh menduga-duga, saya pikir Mas Hend sudah terlalu ”gemas” dan mungkin agak frustrasi untuk mengubah keadaan ekonomi jika dirinya berkutat di kampus dan menjadi pengamat. Beberapa kawan ekonom memang meyakini bahwa cara yang paling efektif untuk mengubah situasi ekonomi adalah dengan cara terjun langsung sebagai eksekutif (birokrat) ataupun sebagai legislator (politisi yang berkantor di Senayan).

Saya sangat bisa mengerti jalan pikiran ini, meski secara pribadi tidak tertarik untuk mengikutinya, karena sudah membayangkan betapa berat dan ”ngerinya” *pressure* tinggi yang harus dihadapi seorang politisi dan legislator. Ah, biarlah orang-orang tegar dan "berani mati" seperti Mas Hend yang rela melakukannya. Saya cukup mendukungnya melalui peran saya sebagai pengamat ekonomi. Toh kedua peran ini bisa bersinergi, bukan saling bersaing atau menihilkan. Kami bisa bekerja sama dan saling melengkapi.

Saya tahu betul Mas Hend menikmati benar peran barunya sebagai ekonom yang juga politisi. Lihatlah bagaimana sepak

terjangnya di Panitia Khusus (Pansus) DPR tatkala menginvestigasi kasus Bank Century. Luar biasa bertenaga, tidak kenal lelah, gagah berani, dan tiada kata jera. Meski dalam beberapa hal substansial yang menyangkut teknis ekonomi-perbankan saya berbeda pandangan dalam melihat kasus Bank Century, tapi sesungguhnya saya diam-diam mengagumi Mas Hend yang antusias dan gigih untuk menguak "misteri" (kalau ada) dan mencari kebenaran dalam kasus ini. *Positioning* seperti inilah yang membuat saya respek terhadapnya. Soal bagaimana kebenaran substansi dan *ending* kasus Bank Century, biarlah nanti sang waktu yang kelak akan menjawabnya.

Pergulatan Paradigma Ekonomi

Buku yang terdiri atas delapan bab ini telah berhasil mendemonstrasikan bagaimana Mas Hend memiliki minat dan kecakapan yang tinggi untuk membahas berbagai aspek dalam perekonomian, dari tataran ideologis, paradigma, hingga level implementasinya secara empiris. Bab yang digarapnya secara paling mengesankan, menurut saya, adalah Bab I, yang menganalisis berbagai paradigma ekonomi yang tengah berkembang. Tulisan-tulisan pada bab ini berasal dari ulasan Mas Hend tentang berbagai pemenang Nobel Ekonomi, serta diskusi ekonomi pada level ideologis dan paradigma.

Saya menyambut baik bahwa Mas Hend merupakan ekonom yang peduli dan amat berminat terhadap kemungkinan "kerja sama" antara ilmu ekonomi (*economics*) dengan disiplin ilmu lain. Bukan cuma bertautan dengan disiplin ilmu sosial (*social sciences*), sebagaimana dulu dikampanyekan dengan getol oleh almarhum guru saya, Profesor Mubyarto, namun bahkan juga dengan ilmu eksakta seperti fisika.

Memang harus diakui bahwa pertautan antara ilmu ekonomi dengan ilmu eksakta sempat agak terganggu tatkala dua pemenang

Nobel Ekonomi 1997 yang menyajikan rumus derivatif dengan matematika yang "canggih", yakni Robert Merton dan Myron Scholes, secara ironis dan dramatis justru gagal mengelola perusahaan investasi Long Term Capital Management (LTCM), sehingga bangkrut pada saat krisis ekonomi Rusia, pertengahan 1998.

Ironi besar kebangkrutan perusahaan di sektor finansial yang pelakunya justru pemenang Nobel inilah yang menyebabkan komite di Oslo pada 1998 "melakukan koreksi" dengan memenangkan Profesor Amartya Sen, guru besar Universitas Harvard (AS) yang pindah ke Oxford (Inggris), karena karya-karyanya di bidang pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) dianggap bisa "mengompensasikan" azab yang ditorehkan Merton dan Scholes.

Pada era modern seperti sekarang, semakin banyak saja ekonom yang menyadari keterbatasan ilmu ekonomi, sehingga perlu "minta tolong" kepada disiplin ilmu lain untuk secara kolektif-simultan mencoba mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dirasa kian pelik dan canggih. Dalam banyak kasus krisis ekonomi, misalnya *the Great Depression* pada 1930-an, krisis menjadi kian mendalam karena tekanan psikologis menjadi terlalu dominan. Kegagalan mengelola sentimen, persepsi, atau tekanan psikologis biasanya dapat memperburuk derajat keparahan krisis ekonomi.

Kesadaran tentang hal inilah yang kemudian menginspirasi para ekonom untuk mempertautkan Ilmu Ekonomi dengan disiplin ilmu lain. Yang paling populer adalah pertautan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Perbedaan keduanya adalah politisi (*politician*) pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan umum (*public interests*), sedangkan pelaku ekonomi umumnya lebih mendahulukan kepentingan pribadi (*private interests*). Walau begitu, keduanya tidak selalu menjadi dikotomi alias bisa dikombinasikan.

Inilah awal mula lahirnya cabang ilmu ekonomi yang disebut *public choice*, yang di era modern digagas oleh Duncan Black (1948), James Buchanan (1949), Kenneth Arrow (1950, 1951), Anthony Downs (1957), Gordon Tullock (1962), serta Mancur Olson (1965). Namun, jauh sebelum era modern, sebenarnya sudah ada John Stuart Mill (*Considerations on Representative Government*, 1861).

Lebih spesifik, Downs (1957) mengajukan teori dan analisis ekonomi tentang demokrasi (*An Economic Theory of Democracy*), sedangkan Arrow (1951) terkenal karena aksiomanya, bahwa tak ada institusi yang bisa menghasilkan Pareto optimal dan nondiktatorial. Pareto optimal adalah situasi di mana tidak seorang pun mendapat manfaat lebih banyak tanpa pengorbanan orang lain. Inilah esensi realokasi.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia terkini, kita menemukan fakta betapa euforia demokrasi bisa menjadi kerikil sandungan dalam pembangunan ekonomi. Dewasa ini persoalan terbesar perekonomian Indonesia adalah sulitnya mendorong sektor riil karena adanya sejumlah kendala. Meski suku bunga perbankan sudah meluncur turun, sektor riil tidak juga bisa bergerak. Masih ada banyak kendala, dari keterbatasan infrastruktur, hambatan birokrasi, struktur pasar monopolistik, hingga euforia demokrasi.

Karut-marut itu kian marak ketika kita menemukan muaranya, yaitu ketiadaan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*). Era reformasi ditandai dengan dibukanya sumbat demokrasi, sehingga siapa saja bisa memberi kritik sekeras apa pun. Ini bagus. Namun jika tidak dikelola dengan baik, malah bisa menjadi tidak produktif.

Contoh sederhana adalah kebijakan anggaran defisit oleh pemerintah. Pemerintah cukup konservatif mengelola APBN, bahkan

muncul ide untuk menekannya menjadi tidak defisit (penerimaan sama dengan pengeluaran). Sepintas hal ini tampak bagus, karena berarti pemerintah tidak perlu mencari utang untuk menutup defisit APBN. Masalahnya, jika pemerintah terlalu hati-hati sehingga APBN tidak ekspansif, dari mana energi pertumbuhan ekonomi akan berasal?

Kebijakan pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ialah kebijakan moneter. Esensi kebijakan di sektor moneter di masa krisis ialah menurunkan bunga agar dapat menjadi stimulus sektor swasta. Sayangnya, penurunan suku bunga ternyata harus terhenti pada titik *BI Rate* 6,5%, karena penurunan lebih jauh sulit dilakukan, tertahan oleh kenaikan inflasi.

Karena keterbatasan ruang gerak inilah, maka kebijakan mesti dialihkan ke sisi fiskal atau anggaran pemerintah. Berarti, kebijakan fiskal harus lebih agresif. Konsekuensinya, defisit anggaran harus sedikit dilonggarkan. Selama ini memang ada semacam *rule of thumb*, bahwa negara berkembang seperti Indonesia bisa menoleransi defisit anggaran hingga 2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal inilah yang selama ini dipegang oleh pemerintah. Faktanya, defisit bisa ditekan menjadi di bawah 2%.

Sesungguhnya, dalam situasi tertentu, misalnya saat terjadi krisis ekonomi (baik domestik maupun global), atau tatkala sektor swasta tidak mempunyai energi yang cukup untuk berekspansi, defisit APBN bisa dinaikkan. Dalam contoh ekstrem, Pemerintah Amerika Serikat (AS) bahkan berani "pasang badan" dengan menaikkan defisit anggarannya hingga USD1,6 triliun pada 2010, karena menyadari bahwa sektor swastanya sedang dalam keadaan "koma" (*dying*). Inilah rekor tertinggi defisit anggaran dalam sejarah AS, lebih dari 10% PDB.

Tentu saja Indonesia tidak perlu meniru contoh ekstrem ini. Juga dilarang keras meniru Yunani yang defisit anggarannya bahkan mencapai 12,6% terhadap PDB. Tetapi pemerintah tidak boleh terlalu

konservatif sebagaimana terjadi pada APBN 2009, yang menyisakan dana tak dapat terserap hingga Rp 38 triliun.

Sisa anggaran jangan dianggap sebagai sebuah ”sukses”, karena pada saat yang sama kita prihatin proyek monorel di Jakarta terbengkalai, karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit (dengan alasan risiko dan jangka waktu pengembalian yang terlalu panjang 25-30 tahun). Bandara Soekarno-Hatta pun kesulitan mendanai proyek Terminal 3, padahal Terminal 1 dan 2 sudah terlalu sesak karena banyak penumpang.

Memang sangat ideal jika kita mampu membangun monorel—dan kelak juga *subway*—di Jakarta dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Namun jika sudah ditunggu sekian lama tidak bisa terealisasi, mengapa tidak diambil alih saja oleh pemerintah? Soal biayanya yang sekitar Rp 7 triliun, sebenarnya tidak masalah. Secara absolut angka ini memang besar, tapi jika dibandingkan dengan manfaatnya yang dapat mengurangi kemacetan Jakarta sehingga mendorong efisiensi, itu tidak bisa dibilang mahal. Saya yakin pemerintah masih bisa mencarikan ruang di dalam APBN kita yang volumenya sudah hampir Rp 1.100 triliun.

Hal yang sama pada kasus Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kalau pemerintah terus ngotot bahwa terminal baru tersebut harus dibiayai sendiri oleh PT Angkasa Pura, itu terlalu lama. Pemerintah harus mengalokasikan APBN untuk mendanai proyek yang bisa dikategorikan strategis ini. Kepadatan penumpang di Terminal 1 dan 2 sudah keterlaluan. Pemerintah harus berinisatif sendiri membiayainya dan DPR rasanya juga akan mendukungnya. Mas Hend saya harap setuju dengan ide ini.

Memang bisa dimengerti ada ketakutan pemerintah untuk menambah utang, karena sorotan kritis sebagian ekonom, DPR, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun sesungguhnya konsensus para

ekonom masih bisa memberi toleransi defisit, misalnya hingga 3% terhadap PDB, atau setara dengan Rp150 triliun. Syaratnya, dana tersebut direncanakan dengan baik untuk membiayai infrastruktur yang kelak dapat meningkatkan efisiensi, serta dialokasikan dengan disiplin tinggi agar tidak terjadi korupsi. Saya yakin hal ini masih bisa dikomunikasikan dengan baik.

Hal yang kini perlu dilakukan pemerintah ialah berani mengambil keputusan, sekalipun mungkin tidak populer. Menambah utang pasti tidak populer, tapi jika itu dilakukan untuk proyek infrastruktur seperti monorel, *subway*, terminal baru bandara yang sudah terlalu padat, apakah itu salah? Rasio utang pemerintah terhadap PDB kita sekarang 30%. Masih lebih baik daripada *emerging markets* di Asia (40%), Zona Euro (80%), AS (84%), apalagi Yunani (115%).

Semua terpulang pada pemerintah. Ketika mekanisme pasar gagal memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita—yang berarti telah terjadi "kegagalan pasar" (*market failure*)—maka solusinya pemerintah perlu mengambil alih. Meski kita percaya pada mekanisme pasar dan bekerjanya "tangan-tangan yang tak tampak" (*invisible hands*), tapi juga harus diingat bahwa mekanisme semacam itu sesekali bermasalah dan memerlukan bantuan pemerintah untuk menguraikannya. Dalam hal pembangunan infrastruktur yang tersendat, saya pikir pemerintah harus berani "pasang badan" dan mengambil alih beban. Tidak harus menunggu swasta yang belum tentu datang, sementara kita sedang berpacu dengan sang waktu.

Profisiat dari sahabat

Melalui berbagai tulisan pendek yang dihimpun dalam buku ini, Profesor Hendrawan Supraktikno sudah memperlihatkan betapa dia adalah ekonom andal. Reputasi ini selanjutnya tengah dipertaruhkan

di arena yang lain: dunia politik. Saya yakin hal ini tidak mudah, namun saya percaya bahwa Mas Hend akan *fight, all out, at all cost,* tidak setengah-setengah, apalagi "main-main" untuk menekuninya. Mas Hend adalah sosok petarung yang akan gagah berani untuk menghadapi segala risiko dari sikap dan keputusannya untuk menjadi politisi.

Namun sesungguhnya saya menyimpan sebersit kekhawatiran, bahwa dia akan kesulitan mencari waktu untuk merenung, membaca, dan mencari inspirasi, tatkala hari-harinya kini sudah dihabiskan untuk berbagai urusan politik. Karena itu saya hanya bisa menyarankan, karena *privilege* waktu sudah sangat sulit ia peroleh, maka ia terpaksa harus sebisa mungkin "mencuri-curi" sang waktu untuk menemukan kehidupannya yang dulu sebagai ekonom, pengajar, dan peneliti yang tekun dan berdedikasi di Salatiga.

Saya sadar bahwa itu merupakan hal yang mahasulit untuk diwujudkan. Namun saya juga tidak mau kehilangan sosok Hendrawan Supratikno yang selama ini saya kenal. "Pekerjaannya" sebagai politisi PDI Perjuangan dan anggota DPR hendaknya tidak melunturkan derajat *scholarly*-nya. Saya sungguh ingin agar dia terus tekun membaca dan menulis seperti dulu. Entah bagaimana caranya, biarlah dia mencari akal sendiri untuk menyiasatinya. Kita tinggal menagih tulisan-tulisan bermutu darinya di kemudian hari.

Akhirnya, profisiat atas penerbitan buku ini. Saya sungguh sangat menikmatinya, lembar demi lembar, paragraf demi paragraf, jengkal demi jengkal. Teriring salam hangat dari sahabat lama di kota yang juga lama, Yogyakarta.

Bulaksumur, 15 Juli 2010.

Pengantar Editor

Menjadi Intelektual Publik

Saat menghadapi tulisan Prof. Hendarawan, seorang editor naskah akan berbahagia: sedikit sekali yang harus dirapikan. Editor langsung bisa belajar—tanpa terganggu hal-hal teknis yang merusak konsentrasi penyerapan pengetahuan yang jadi substansi sebuah tulisan. Lalu bila hari ini ada perbaikan—karena alasan selingkung, misalnya—segera pekan berikutnya tulisan sudah sesuai perbaikan hari ini.

Itu berbeda dari biasanya. Mungkin lantaran "terlalu pintar", banyak sekali akademisi yang menulis dengan gaya "ruwet sendiri" atau menghargai koran sebagai jurnal atau menulis untuk koran disamakan dengan menulis makalah seminar yang berpanjang-panjang. Penulis macam itu, yang merasa punya pengetahuan bahasa cukup, kadang komplain luar biasa bila diksinya atau istilah teknisnya diubah lantaran dianggap tidak tepat oleh editor.

Pada tulisan-tulisan yang hampir setiap Rabu hadir di hadapan pembaca harian *Seputar Indonesia* sejak akhir 2006, Prof. Hendrawan memaparkan ilmu ekonomi dengan ringan, mengajukan argumentasi sosial yang kokoh, dan menyemangati masyarakat dengan *smooth,* sinisme pada saat tertentu, dan mengajukan harapan tanpa berlebihan. Pada tulisan-tulisannya kita tidak menemukan keberapi-apian yang biasanya disuarakan dengan lantang oleh aktivis. Hiperbola khas politikus tidak tampak dan keburu-buruan yang biasanya terlihat dari presentasi akademisi kampus, yang selalu mengaku sibuk, sama sekali tak muncul. Pada tulisan Hendrawan kita merasakan kehadiran semangat ungkapan almarhum Rendra, "Menyatakan sesuatu yang

salah sebagai salah, tidak dengan kebencian."

Walau begitu, keberpihakan profesor satu ini jelas. Meminjam istilah Gus Dur yang kemudian jadi slogan PKB, maju tak gentar membela yang benar. Ringkasnya, Profesor Hendrawan adalah intelektual publik yang di Indonesia ini jumlahnya makin susut saja.

Siapakah intelektual publik itu? *The New York Times* punya takaran, "Intelektual publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), otoritas (*authority*), tentang isu-isu aktual (*issues of the day*), dan memiliki kemampuan menyampaikannya kepada publik."

Artinya, seseorang disebut intelektual publik bila memiliki kelengkapan ini: pengetahuan, otoritas, isu-isu aktual, dan bahasa populer. Dua yang disebut pertama pastilah dimiliki oleh umumnya intelektual, termasuk di kalangan akademisi. Syarat ketiga juga mungkin mudah dikuasai, tetapi mempresentasikan ketiga hal di atas dalam bahasa populer tidaklah mudah dan tidak setiap intelektual sanggup berperan di sini dengan cemerlang. Soekarno dan Sjahrir adalah monumen besar intelektual publik di Indonesia pada masa kemerdekaan.

Sesulit apa menjadi intelektual publik? Menurut hemat kami, sesulit menyederhanakan gagasan yang besar, bercabang-cabang dan kompleksnya pengetahuan kita dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh sebanyak-banyaknya audiens.

Menjadi intelektual publik juga merupakan pilihan. Amat banyak intelektual yang mumpuni di negeri ini, tetapi sedikit saja yang memilih menjadi intelektual publik. Prof. Hendrawan adalah satu dari yang tersedia kini.

Jay AM
Masirom

PENGANTAR PENULIS

Sesungguhnya telah lama saya bermaksud membukukan berbagai tulisan yang pernah dimuat di sejumlah surat kabar nasional. Namun maksud tersebut berkali-kali gagal. Alasannya bermacam-macam. Terkadang saya mengalami kesulitan untuk mencari kembali *file* dokumen tulisan tersebut, dan mengetik ulang naskah yang sama dari kliping koran membutuhkan waktu tak sedikit. Tidak jarang, saat keinginan muncul, berbagai kesibukan lain yang berdaya tarik lebih tinggi menyeruak. Hal yang juga sering mengganggu saya ialah pandangan sejumlah teman bahwa membukukan kumpulan tulisan yang pernah dibuat merupakan pekerjaan orang malas—orang yang tidak punya cukup waktu untuk menulis dengan fokus, target, dan stamina seorang pelari maraton.

Setelah berpikir berulang kali, akhirnya datang juga dorongan dari Saudara Masirom dan Jay, editor buku ini, yang tanpa banyak basa-basi mengumpulkan berbagai *file* tulisan-tulisan tersebut. Masirom adalah editor Harian *Seputar Indonesia,* yang selama ini rajin mengingatkan, sekaligus menagih, tulisan-tulisan yang sedapat mungkin diterbitkan setiap pekan. Dua staf saya, Ria dan Heri, juga bersemangat mengetik ulang sejumlah tulisan lama yang terbit. Berkat kerja keras mereka, akhirnya sebagian besar tulisan yang dimuat di surat kabar nasional, di luar yang terbit di majalah dan naskah ceramah, dapat dibukukan seperti ini.

***

Tidak sedikit teman yang bertanya, mengapa saya banyak menulis soal-soal di luar bidang pendidikan formal saya, yaitu bidang manajemen.

Agak susah juga menjawabnya. Sejak di sekolah menengah atas saya memang memiliki minat terhadap banyak persoalan kehidupan dan kemasyarakatan. Saya masih ingat saat mendapat tugas untuk mengasuh majalah dinding sekolah dan memilih karya-karya penting yang pantas dipajang di sana. Kegemaran ini berlanjut saat beberapa tahun saya ikut mengelola koran kampus, *Gita Mahasiswa,* di Salatiga.

Perkenalan dengan Arief Budiman dan Ariel Heryanto banyak mendorong saya untuk membaca buku-buku di luar ilmu manajemen. Kampus UKSW Salatiga, yang kerap disebut sebagai "kampus Indonesia mini", juga merupakan kampus yang sangat kondusif untuk menumbuhkan pemikiran kritis, karena kampus ini memiliki cita-cita untuk melahirkan "*creative minority*"—kelompok masyarakat terdidik yang dari segi jumlah tidak besar tetapi memiliki kemampuan kreatif untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam dan bersama masyarakat. Bersama Arief Budiman dan kawan-kawan saya terlibat dalam diskusi serius mengenai Marxisme, sistem ekonomi sosialisme, dan paradigma dependensia.

Studi lanjut saya di Leuven, Belgia, sedikit banyak mengubah kiblat teoretis yang saya dalami. Di kampus ini, untuk studi MBA, saya harus mendalami buku-buku yang bercorak kapitalistik. Meski di sela-sela kuliah saya masih sempat mengumpulkan sejumlah buku tentang sosialisme, harus diakui saya semakin terbiasa mendalami pemikiran-pemikiran Joseph Schumpeter, Milton Friedman, George Stigler, Herbert Simon, Kenneth Arrow, dan sejumlah tokoh besar lain yang banyak mengilhami pendalaman teori dalam bidang pasar keuangan, struktur pasar, dan manajemen organisasi.

Sepulang dari Leuven, di mata teman-teman akademisi, saya dinilai banyak memopulerkan dua cabang ilmu ekonomi organisasi yang dikenal sebagai Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Biaya-Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*). Melalui perpaduan